

FENOMENA GOLONGAN PUTIH (STUDI PERILAKU POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

KARIMUN SANI HARAHAP NIM. 1410300014

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 2018



FENOMENA GOLONGAN PUTIH (STUDI PERILAKU POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Oleh

KARIMUN SANI HARAHAP

NIM. 1410300014 PRODI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag NIP. 19720313 200312 1 002 **PEMBIMBING II**

Ahmatnijar, M.Ag NIP. 19680202 200003 1 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id - email: fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi

An. Karimun Sani Harahap

Padangsidimpuan, Juli 2018

KepadaYth:

Dekan Fakultas Syariah dan Imu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Karimun Sani Harahap yang berjudul "FENOMENA GOLONGAN PUTIH (STUDI PERILAKU POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2014)" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tana Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Nip. 19720313 200312 1 002 Ahmatdijar, M.Ag

Pembimbing II

Nip. 1968020 200003 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Karimun Sani Harahap

NIM

: 1410300014

Fakultas

: Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan

: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

: Fenomena Golongan Putih (Studi Perilaku Politik

Masyarakat Kota Padangsidimpuan Pada Pemiliahan Presiden

dan Wakil Presiden RI Tahun 2014)

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2018 Pembuat Pernyataan,

Karimun Sani Harahap NIM. 1410300014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Karimun Sani Harahap

NIM : 1410300014

Jurusan : Hukum Tata Negara Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Fenomena Golongan Putih (Studi Perilaku Politik Masyarakat Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Padatanggal: Juli 2018

Yang menyatakan,

Karimun Sani Harahap NIM.1410300014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id - email: fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama

: Karimun Sani Harahap

NIM

: 1410300014

Judul Skripsi : FENOMENA GOLONGAN PUTIH (STUDI PERILAKU POLITIK MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL

PRESIDEN RI TAHUN 2014

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag. NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H. NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.

NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H. NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. M. Syafri Gunawan, M. Ag. NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Dame Siregar, M.A. NIP. 1963 0907199103 1 006

Pelaksana Sidang Munaqasyah

: Padangsidimpuan : Jumat, 29 Juni 2018

Hari/Tanggal Pukul

: 14.00 s/d 15.30 WIB

Hasil/Nilai

: 75 (B)

Indeks Prestasi Komulatif (IPK)

: 3,48 (Tiga Koma Empat puluh Delapan)

Predikat

: Amat Baik

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia amin.

Skiripsi dengan judul *Fenomena Golongan Putih (Studi Perilaku Politik Masyarakat Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI Tahun 2014).* Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
- 2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- 3. Ibu Dermina Dalimunthe MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan sekaligus selaku penasehat akademik.
- 4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmatnijar M.Ag, sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan

- waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- 6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta, Arman Syufri Harahap dan Ibunda tersayang Tiwarsida Ritonga telah menyayangi dan mengasihi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
- 7. Nilpa Maulidini Harahap dan Ibrahim Harahap selaku adek kandung saya yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Keluarga besar Arman Syufri Harahap dan Tiwarsida Ritonga yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
- 9. Teman dan sahabatku jurusan Htn (1) angkatan 2014, Ramadhan Siregar, Rizki Ananda, Ari Saputro, Arianto, Hanafi Rizki, Muhammad Hidayat, Rian, Hari Ati, Winda, Salamah, Desi, Eka, Reu Nisa, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian. Adek- adek ku fakultas Syariah danIlmu Hukum yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal semoga kita semua sukses amin.
- 10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam

penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semu amin.

Padangsidimpuan, April 2018

Penulis

Karimun Sani Harahap

NIM: 14 103 00014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

HurufArab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidakdilambang kan	Tidakdilambangkan
ب	Ва	В	Ве
ت	Та	Т	Te
ث	żа	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
۲	ḥа	ņ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
7	Dal	D	De
?	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	Es
ص	şad	ş	Esdan ye
ض	ḍad	ģ	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<u></u> żа	Ž.	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	.'.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
[ئ	Kaf	K	Ка
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
٥	ha	Н	На
۶	hamzah		Apostrof
ي	уа	Υ	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وْــــــ	Dommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ	Fatḥah dan Ya	Ai	a dan i

وْ	Fatḥah dan Wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ای	Fatḥah dan Alif atau Ya	ā	a dangaris atas
<i>ي</i>	Kasrah dan Ya	ī	i dangaris di bawah
<i>9</i> '	Dommah dan Wau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan dommah, transliterasiny aadalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddaha atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilam bangkan dengan sebuah tanda, tandas yaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasiinitan dasyaddah tersebut dilam bangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitan dan syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

- J. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah.
- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti hurufqamariahadalahkata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depanDaftarTransliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia t idak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituli sterpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huru fawal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidakdipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliteras iini merupakan bagia takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *PedomanTransliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Karimun Sani Harahap

Nim : 1410300014

Judul Skripsi : Fenomena Golongan Putih (Studi Perilakun Politik Masyarakat

Kota Padangsidimpuan Pada Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden RI Tahun 2014)

Fenomena Golput tidak dapat dipungkiri selalu ada disetiap pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur maupun legeslatif. Golput pada awalnya merupakan gerakan moral yang di proklamirkan pertama kali di gedung budaya Jakarta sebagai bentuk protes terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara pada waktu itu.

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana fenomena Golput dalam pemilihan Presiden di Kota Padangsidimpuan? (2) Bagaimana pandangan Islam tentang Golput? (3) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Golput pada pemilihan Presiden 2014 di Kota Padangsidimpuan.

Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan tersebut adalah teori perilaku pemilih, faktor yang mempengaruhi tidak memilih (Golput), dan konsep golongan putih. Adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan Informan masyarakat dikota Padangsidimpuan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pemilihan Presiden tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan masyarakat masih kurang percaya terhadap calon Presiden dan wakil Presiden, karena masyarakat menganggap janji-janji pada saat kampanye tidak terealisasi apabila kekuasaan sudah dimiliki mereka dan kebijakan yang diberikan jauh dari kata memuaskan diera sebelum 2014. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak ikut memilih (Golput) pada saat pemilihan 2104.

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	
	AN PENGESAHAN PEMBINGBING	
	PERNYATAAN PEMBINGBING	
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
	PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
	K	i
	ENGANTAR	
PEDOM	AN TRANLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR	R ISI	xi
DAFTAR	R TABEL	xiii
DAFTAR	R LAMPIRAN	xiv
BAB I : P	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Ruang Lingkup Masalah	5
C.	Rumusan Masalah	5
D.	Batasan Istilah	6
E.	Tujuan Penelitian	6
F.	Manfaat Penelitian	7
G.	Sistematika Pembahasan	7
BAB II L	ANDASAN TEORI	
	Konsep Fenomena	
	Konsep golongan putih (Golput)	
	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang golput	
D.	Faktor yang mempengaruhi tidak memilih (Golput)	
	1. Faktor Sosial Ekonomi	
	2. Faktor Psikologis	
	3. Faktor Rasional	
E.	B B F	
F.	Kajian Terdahulu	32
	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Dan Sifat Penelitian	
	1. Jenis Penelitian	
_	2. Sifat Penelitian	
	Waktu Dan Lokasi Penelitian	
C.	~ Wille #1 2 www	
D.	Metode Pengumpulan Data	
	1. Metode Observasi	
	2. Metode Wawancara	
_	3. Metode Dokumentasi	
E.	Teknik Analisis Data	39

BAB IV HAS	IL PENELIAN	
A. Sej	arah Berdirinya Kota Padangsidimpuan	40
1.	Letak Geografis	40
2.	Domografis	41
3.	Umur dan Jenis Kelamin	41
4.	Agama	43
5.	Pendidikan	43
6.	Fasilitas Kota Padangsidimpuan	44
	a. Rumah Ibadah	45
	b. Kesehatan	45
B. Ga	mbaran Umum Keberadaan Golput di Kota Padangsidimpuan	46
C. Fal	ktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Yang Sudah Terdaftar	
Sel	pagai Pemilih Tetapi Tidak Ikut Dalam Pemilihan	51
1.	Faktor Sosial Ekonomi	51
2.	Faktor Psikologis	55
3.	Faktor Rasional	57
BAB V PENU	JTUP	
A. Kesi	mpulan	60
B. Sara	n	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data penggunaan surat suara pada pemilihan Presiden dan	
	wakil Presiden daerah Kota Padangsidimpuan 2014	40
Tabel 2	: Penduduk menurut umur dan jenis kelamin dikota	
	Padangsidimpuan.	41
Table 3	: Agama yang dianut dikota Padangsidimpuan	42
Table 4	: Keadaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat	
	Padangsidimpuan tahun 2014	43
Tabel 5	: Jumlah sarana Ibadah setiap dikota Padangsidimpuan2014	44
Tabel 6	: Banyaknya fasilitas kesehatan menurut	
	jenisnya dikota Padangsidimpuan.	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara untuk informan Ketua Komisi Pemilihan Umum Lampiran II : Pedoman Wawancara untuk informan Masyarakat Kota Padangsidimpuan

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilih partai politik merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga negara Republik Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan partai politik yang dipilih, mereka menganggap aspirasi atau pun hak suaranya dapat disalurkan melalui pemilihan umun. Setiap lima tahun negara republik Indonesia melaksanakan pemilihan untuk memilih pemimpin baru menggantikan pemimpin lama. Dalam pemilihan selalu ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang dikenal dengan sebutan golongan putih (Golput). Karena tidak sesuai dangan apa yang diharapkannya. Golput pada awalnya adalah "gerakan moral" yang terjadi pada tanggal 3 Juni 1971 bertempat di Balai Budaya Jakarta, gerakan moral tersebut dilaksanakan satu bulan sebelum hari pemungutan suara pemilihan pertama pada masa Orde Baru.

Pelajaran dari pemilihan umum 1955, 1999, 2004, dan 2009 penulis mengamati dari tahun ketahun angka Golput cenderung naik, Golput pada 1955 sebesar 12,34%. Pemilu tahun 1999, sebesar 23,34% (Pemilihan Umum Legislatif 2004), 23,47% (Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 putaran I), 24,95% (pemilihan Presiden 2004 putaran II). Di pemilihan Presiden

¹Yusri Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), hlm. 205.

²Abdurrahman Wahid dkk, *Megapa Kami Memilih Golput*, Jakarta: Sangon, 2009, hlm. 98.

putaran II setara dengan 37.985.424 pemilih. Pada pemilihan legislatif 2009 jumlah Golput 30% bila dikalikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan Perpu No. I/2009 sebesar 171.265.442 jiwa. Jadi jumlah Golput setara dengan 51.379.633 pemilih.³ Adapun pada Pilperes 2014 KPU mencatat jumlah seluruh suara sah adalah 124.972.491 suara dengan angka perolehan tingkat Golput mencapai 24,89 persen. 4 Golput memang bukanlah nama calon atau nama sebuah partai di Indonesia, namun Golput selalu ikut serta dalam pemilihan dari waktu ke waktu baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan Legislatif maupun pemililihan Presiden. Fenomena Golput semakin menguat pada tahun 90an, dimana partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai peserta pemilihan umum yang bukan dari unsur partai politik (Parpol), menjadi single majority. Kemunculan Golput semakin meraja rela ketika terjadi konsensus nasional yang menyepakati fusi beberapa kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hal ini dapat dilihat ketika pelaksanaan pemilihan 1992. Pada pemilihan kelima pada era Orde Baru. banyak mahasiswa terutama di Jogjakarta mengkampanyekan Golput sebagai pilihan dalam pemilihan.

Dalam konteks Islam sejarah mencatat, wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Pada 11 H/632 M sempat mengguncangkan umat Islam. Karena tidak adanya

³Kacung Marijan, *Sistim politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 66-72.

⁴News.detik.com, diakses tanggal 16 September 2017 pukul 15 :30 WIB

wasiat dari Nabi Muhammad Saw tentang cara bangaimana untuk menunjuk pengganti pemegang kekuasaan menimbulkan polemik yang menyita konsentrasi mereka karna tidak ada di dalam hadis dan Al-quran selain petunjuk yang sifatnya hanya secara umum agar ummat Islam mencari menyelesaikan dengan musyawarah.⁵ Benih-benih fanatisme golongan mulai bersemi golongan Muhajirin dan Anshor adalah dua kekuatan besar yang saat itu saling menginginkan posisi ke Khalifahan. Perbedaan yang terjadi pada saat rapat di Saqifah Bani Sa'adah akhirnya membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah pertama. Bagaimanapun, terpilihnya Abu Bakar memiliki arti yang monumental bagi sistem kenegaraan di berbagai belahan dunia. Di mana nilai-nilai yang diterapkan mencerminkan suatu sistem yang demokratis, sekaligus menepis upaya penerapan pemerintahan ala monarki. Pembai'atan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam saat itu terhadap Abu Bakar secara tidak langsung memberikan indikasi tentang legalitas kedaulatan rakyat, meskipun belum dikenal pemilu secara langsung, namun consensus para Muhajirin dan Ansor ini dalam beberapa hal memiliki hakekat yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan yang ada pada saat ini.

Sosial politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang atau kelompok, dan bagaimana seseorang atau golongan tersebut dapat menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap

⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara*, (Jakarta: Ui-Press, 1993,hlm. 21-22.)

gejolak politik. Namun tidak dapat dipungkiri, partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali, mengalami pasang surut. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya Golput dalam setiap pelaksanaan pemilihan dalam pemilihan Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.

Kota Padangsidimpuan merupakan Kota di Sumatra Utara yang angka Golputnya selalu meningkat dari tahun ketahun sekaligus pada pemilihan Presiden Kota Padangsidimpuan mendapat peringkat ke *enam* dalam hal tingkat Golput bisa dikatakan tinggi di Sumatra Utara, terbukti pada Pemilihan Presiden tahun 2009 jumlah Golput di Kota Padangsidimpuan sebanyak 27,3% bila dikaliakan dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) sebanyak 148.000 pemilih suarat suara yang digunakan 100.040 surat suara dan yang tidak di gunkan 47.960 sedangkan jumlah Golput pada pemilihan Presiden tahun 2014 Golput di Padangsidimpuan sebanyak 36% dari DPT 148.586 yang surat suara yang digunkan 95.734 dan yang tidak digunakan 51.959 berarti dari pemilihan Presiden tahun 2009 ke pemilihan Presiden tahun 2014 Golput di Padangsidimpuan sebanyak 9,7%.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan yang berlangsung kamis tanggal 09 Juli 2014 kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Partisipasi masyrakat untuk menggunakan hak pilihnya sekitar 64%.

⁶Syamsuddin Haris, "Golput dan Pemilu 2009", dalam *Kompas*, 30 Juni 2008

_

⁷Data Kpu Kota Padangsidimpuan di akses tanggal 09 Oktober 2017

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam masalah apa saja yang berkaitan dengan Golput. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melihat dan mengkaji lebih jauh lagi khusus pada pemilihan Presiden 2014 yang merupakan pemilihan langsung untuk memilih Presiden lima tahun ke depan. Hal ini akan penulis susun dalam sebuah tulisan berbentuk Skripsi dengan judul "Fenomena Golput di Kota Padangsidimpuan" (Studi Perilaku Politik Masyarakat Kota Padangsidimpuan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2014).

B. Ruang Lingkup Masalah

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja alasan seorang untuk tidak ikut memilih atau tidak datang ke TPS pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kota Padangsidimpuan. Penilitian ini berusaha menjari faktor penyebab warga masyarakat kota Padangsidimpuan yang tidak menggunakan hak suaranya atau hak pilihnya yang telah di berikan Negara untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan umum pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan juga sikap orang yang tidak menggunakan hak suaranya.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya demokrasi rakyat bebas menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin seperti apa. Dari pernyataan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penilitian sebagai berikut:

- Bagaimana fenomena Golput dalam pimilihan Presiden dan Wakil Presiden
 2014 di Kota Padangsidimpuan ?
- 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap Golput?
- 3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Golput pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Padangsidimpuan ?

D. Batasan Istilah

Penelitian ini membutuhkan pembatasan masalah dengan tujun untuk dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar. Maka batasan dalam penelitian ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya golput di Kota Padangsidimpuan pada pemilhan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dan fakta fenomena terjadi di masyarakat kota Padangsidimpuan

E. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Golput di Kota Padangsidimpuan pada pemilihan Presiden 2014.
- Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap memilih Golput pada pemilihan Presiden 2014 di Kota Padangsidimpuan
- Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya Golput di Kota Padangsidimpuan pada pimilihan Presiden 2014.

F. Manfaat Penelitihan

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Akademis

Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Iain Padangsidimpuan mengenai Golput di kota padangsidimpuan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Manfaat Peraktis

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam hal ini KPU Kota Padang Sidimpuan secara khusus untuk mengantisipasi Golput atau dapat menekan angka Golput itu sendiri.
- Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingku, rumusan masalah tujuan, bataan istilah dan kengunaaan penelitian, dan kajian terdahulu.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari fenomena, faktor mempengaruhi, fatwa Majelis ulama Indonesia tentang Golput, kerungian golput di kota Padangsidimpuan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014.

Bab III adalah tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, metodologi pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab IV meliputi mempelajari Golput masyarakat kota Padangsidimpuan pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden dengan jumlah Golputnya meningkat.

Bab V bab ini merupan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan dalam hal ini sebagi jawaban rumusan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

Fenomena menguatnya golongan putih (Golput) dalam beberapa pemilihan yang di gelar ditanah Air tampak semakin menghawatirkan. Secara kualitatif, orangorang yang memilih Golput ini alahah warga Negara yang mempunyai hak suara namun tidak mencoplos atau tidak datang ke TPS. Kalaupun mencoblos, mereka dengan sengaja membuat suara tidak sah atau *absente*, dengan segaja dan ini yang membedakan antara Golput dengan sekedar kesalahan mekanisme pencoblosan sehinggah membuat surat suara tidak sah.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadipribadi dan dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan,
mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi
politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota
partai politik dan lain-lain. Secara umum, partisipasi politik dipahami sebagai ke
ikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam
kehidupan sosial dan politik.² Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya
partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada
pemerintah (sistem politik).

¹Abdurrahman Wahid dkk, *Megapa Kami Memilih Golput*, Jakarta: Sangon, 2009, hlm. 91

²Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Jakarta: Fajar Agung, hlm. 170

Selanjutnya jika dipahami subtansi dari aspek politik demokrasi yang ada di atas maka lahirlah adanya sebuah proses dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa atau negara untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasinya, artinya tidak boleh adanya sebuah paksaan kepada mereka untuk memilih seorang pemimpin tertentu yang tidak dikehendaki.

Dalam teori pilihan rasional dikemukakan bahwa manusia politik (homo politicus) sudah menuju kearah manusia ekonomi (homo economi cus), hal ini berkaitan erat dengan adanya faktor politik dan ekonomi, terutama dalam penentuan kebijakan publik.³

A. Konsep Fenomena

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fenomena diartikan sebagai rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia: 1997)

Fenomena dari bahasa Yunani; *Phainomenon*, "apa yang terlihat", dalam bahasa Indonesia bisa berarti:

- 1. Gejala, misalkan gejala alam
- 2. Hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra
- 3. Hal-hal mistik atau klenik

³Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 92.

4. Fakta, kenyataan, kejadian

Fenomena juga diartikan sebagai berikut:

- a. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam) atau gejala.
 Contoh: Gerhana adalah salah satu ilmu pengetahuan;
- b. Fenomena diartikan sebagai fakta dan kenyataan.

Contoh: Peristiwa itu merupakan sejarah yang tidak dapat diabaikan.⁴

Kata fenomena juga diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal atau perkara.⁵

Jadi berdasarkan penjelasan diatas, fenomena dalam ruang lingkup social adalah rangkaian peristiwa, fakta maupun kenyataan yang sedang terjadi di masyarakat yang dapat diamati ataupun diteliti melalui pendekatan-pendekatan tertentu dalam hal ini fenomena Golput yang sedang hangat-hangatnya terjadi di masyarakat kota Padangsidimpuan.

B. Konsep Golongan Putih (Golput)

09:30

Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan diantara beberapa kelompok generasi muda, terutama mahasiswa, untuk mempengaruhi pemilihan karena dianggap kurang memenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan secara demokratis. Yang disebut antara lain ialah kurang

⁴http://www.kamusbesar.com/fenomena diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul

⁵http://www.artikata.com/ diakses pada tanggal 29 November 2017pukul 09:35

adanya kebebasan-kebebasan yang pemilihan secara demokratis. Yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan yang merupakan persyarat bagi suatu pemilihan yang jujur dan adil . Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-masing tempat pemilihan umum (TPS). Mereka menamakan dirinya golongan putih atau Golput.⁶

Istilah Golput muncul pertama kali menjelang pemilihan pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Sikap untuk tidak memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan Almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak.⁷

Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai kelompok putih yang tidak memilih, mereka bahkan mengajukan tanda gambar segilima hitam dengan dasar putih. Namun Pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, diikuti oleh 95 % pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan fenomena Golput adalah merasa demokrasi dalam protes atau ketidak puasan kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip demokrasi atau penentangan langsung terhadap pemerintahan rezim Orde Baru pimpinan Soeharto.

Menjelang Pemilu 1992, Golput terjadi lagi sehingga bayangan kekuatannya di identikkan sebagai partai keempat, disamping PPP, Golkar dan

⁷ Fadillah Putra, *Partai politik dan kebijakan publik,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 104

-

⁶Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta:Gremia Pustaka Utama, 2008), hlm. 479

PDI. Namun jumlah pemilih pada pemilihan 1992, kembali menurut pandangan pemerintah, di atas 90 %, persisnya 91 %. Seminggu menjelang pemilihan 29 Mei 1997, ketua umum dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, selaku pribadi, mengumumkan untuk tidak menggunakan hak politiknya untuk memilih. Pernyataannya ini lalu dianggap sebagai kampanye terus terang kepada massa pendukungnya untuk tidak ikut memilih, meski hal itu dibantah Megawati

Meski ada aksi PDI Perjuangan itu, jumlah pemilih pada Pemilu 1997 dilaporkan mencapai 90,58 %.8

Angka 90 % itu memang diakui merupakan angka semu. Karena pemilihan zaman Soeharto disebut banyak pihak identik dengan kecurangan demi untuk memenangkan Golkar. Angka adalah bagian dari rekayasa yang sangat menentukan.

Sikap orang-orang Golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan diluar perkiraannya, kaum Golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. *Pertama*, menusuk lebih dari satu gambar partai. *Kedua*, menusuk bagian putih dari kartu suara. *Ketiga*, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilih sepenuhnya adalah hak.

⁸ http//www. kompas. com, diakses tanggal 19 September 2017 pukul 14:30 WIB

Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilihan, Tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu peserta Pemilu.⁹

Jadi berdasarkan hal di atas, Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilihan. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di TPS hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori Golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah Golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.

Dalam buku political explore, *Indra J. Piliang* menyatakan bahwa Golput dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon Presiden-Wakil Presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian mereka memilih Golput. Dia membagi Golput menjadi tiga bagian yaitu: *Pertama*, Golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ke tata negaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan Golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti *state*, ketika *state* dianggap hanyalah bagian

⁹ http//www.kompas.com, diakses tanggal 20 September 2017 pukul 15:20 WIB

korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi Golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU Pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. 10 Sistem pemilihan 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah samar-samaratau semu.

Kedua, Golput pragmatis, yakni Golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada Pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.

Ketiga, Golput politis, yakni Golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilihan, tetapi memilih Golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

Menurut Mufti Mubarak, bagi masyarakat sikap Golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai politik dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat, Golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah¹¹.

Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok golput. Pertama. adalah kelompok Golput awam, yaitu mereka yang

¹¹*Ibid.*, hlm. 541

¹⁰ Efriza , *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 545

mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ketingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.

Kedua, adalah kelompok Golput pilihan, yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilihan atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding Golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi. ¹²

Dalam buku Political Explore beberapa ilmuan mendefinisikan Golput, yang pertama yaitu menurut Irwan H, Dulay dia mengatakan golongan putih dinamakan menjadi Golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam ajang pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan Legislatif, Pilpres, Pilkada maupun pemilihan kepala desa. Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada ajang pemilihan terbatas pada suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Menurut B. M Wibowo,

22

 $^{^{\}rm 12}$ Novel Ali, $Peradaban\ Komunikasi\ Politik,$ (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm.

Golput ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu partai peserta Pemilu.¹³

Selanjutnya, ia juga berpendapat, Golput adalah sebutan bagi orang atau kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu untuk menentukan pemimpinnya. Menurut Susan Weich, ketidak hadiran seseorang dalam Pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidak puasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri Pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan penghitungan untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara financial dengan tidak hadir dalam pemilihan, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Menurut Muhammad Asfar, dia mengatakan batasan perilaku non voting tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada disuatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih, dalam konteks semacam ini, non voting adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari H pemilihan karena faktor tidak adanya motivasi.

Golput dalam terminology ilmu politik seringkali disebut dengan nonvoter. Terminologi ini menunjukan besaran angka yang dihasilkan dari ajang pemilihan diluar *voter turn out*. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan Christopher

¹³Efriza, Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politi ,(Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 534

Stout (2007) mengkategorikan *Non–Voter* tersebut menjadi tiga ketegori yakni; (a) *Registered Not Voted*: yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak menggunakan hak pilih, (b) *Citizen not Registered*: yaitu kalangan warga negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak pilih dan (c) *Non Citizen*: mereka yang dianggap bukan warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga tidak memiliki hak pilih. ¹⁴

C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Golput

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah ke agamaan dan berlaku untuk umum. Berdasarkan kamus besar Indonesia fatwa adalah jawab (putusan, pendapat) yang diberikan oleh ahli hukum Islam terutama oleh Mufti, tentang suatu masalah.

Lahirnya fatwa haramnya Golput dilatarbelakangi oleh beberapa faktor: pertama, adanya fenomena yang menunjukkan gerakan untuk tidak memilih pada pemilihan 2009; kedua fenomena Golput diyakini meredupsi nilai-nilai demokrasi; ketiga, ada permintaan untuk dikeluarkan fatwa, terutama datang dari tokoh PKS; keempat kemungkinan MUI ingin berperan mensukseskan pemilihan 2009 untuk mewujudkan cita-cita bangsa untuk menghasilkan pemilihan yang Amanah, Siddqi, Tabhli, Fathanah.

Beberapa kalangan juga menduga sebelum pemilihan 2009, bahwa fatwa MUI yang mengharamkan Golput dalam pemilihan diyakini untuk mendongkrak partisipasi pemilihan dalam pemilihan 2009, namun naiknya partisipasi pemilih

-

¹⁴*Ibid.*, hlm. 150

akibat fatwa itu sulit diukur, tidak mudah untuk menentukan dampak atau pengaruh fatwa untuk mengurangi Golput. Yang jelas adanya orang-orang Islam yang sedang mengikuti fatwa MUI, ada juga orang memutuskan pendapat sendiri.¹⁵

Oleh karena itu pemilihan untuk memilih pemimpin yang baik harus didukung oleh ummat Islam. Jika diantara para calon sudah memiliki syarat untuk jadi pemimpin maka ummat Islam wajib memilih dan haram untuk Golput. Perilaku tidak memilih pemimpin bagian dari kemungkinan yang harus dilawan dengan tangan, lisan dan hati, tepi yang terakhir termasuk selemah-lemah Iman. Pada dasarnya pemilihan adalah hak setiap warga negara. 16

Pada tanngal 26 Januari 2009 M/29 Muharram 1430 H, Komisi tersebut berhasil menetapkan sebuah fatwa mengenai Golput dalam pemilihan, dengan dasar pertimbangan bahwa:

- Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi ummat dan kepentingan bangsa.
- Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan
 Imamah dan Imarah dalam kehidupan bersama.

¹⁵Yusuf Chirul Puad, H.M. Atho Muzhar, dkk. Fatwa Majelis Ulama Indnesia dalam Fersfektip Hukum dan Perundang-undangan, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 440

_

¹⁶ UU No. 10 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau dalam peraturan Komisi Pemilihan Umun No. 11 tahun 2008

3. *Imamah* dan *Imarah* dalam Islam mengajarkan syarat-syarat sesuai

ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (Siddiq),

terpercaya (Amanah), aktif dan aspiratif (Tabliqh), mempunyai

kemampuan (Fathanah), dan memperjuangkan Ummat hukumnya

adalah wajib.

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana

yang disebut dalam dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama

sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah

haram.¹⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MUI akhirnya merekomendasikan:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin yang

mengemban tugas Amar maqruf nahi mungkar.

2. Pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum perlu meningkatkan sosialisa

penyelenggaraan pemilihan agar partisipasi maysarakat dapat meningkat,

sehingga hak maysarakat terpenuhi. 18

Dalam menetapkan mengenai haramnya Golput, MUI memiliki dasar

argumentasi yang digali dalam Al-qur'an, Hadist, dan pendapat ulama. Berikut

adalah petikan dasar-dasar argumentasi yang di kemukakan MUI:

17 Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijma` Ulam Komisi Fatwa Se-indonesia III tahun

2009.

(Jakarta. MUI, 2009), hlm. 23 ¹⁸*Ibib.*, hlm. 23

_

1. Al-Qur`an Suroh An-Nisa ayat 58:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

2. Al-Qur`an Suroh An-Nisa ayat 59:

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُويلاً ﴾ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأُويلاً ﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

3. Hadist Nabi Muhammad SAW: "Dari Abdullah bin Abi Umr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Sesungguhnya Rosullulah SWA bersabda: Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharaman yang menghalalkan yang haram" (HR. At-Tarmizi).

- 4. Pendapat Al-Mawardi dalam bukunya kitab Al-Syultoniyyah hlm 4 "Kepemimpinan (Al-Imamah) merupakan tempat pengganti Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia atau negara dan memilih seorang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut Ijma".
- 5. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah As-Syar`iyah: "penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan akan tidak tengak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna. Kemaslahatan tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membunuh. Dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin". 19

Al-Mawardi dan Ibnu Taimyah adalah dua ulama Khalaf yang sangat terkenal dan mumpuni dalam soal pemikiran Politik Islam. Pendapat dua ulama ini langsung berbica pada kewajiban menegakkan *Imamah* sebagai sarana untuk menegakkan agama. Dengan kata lain, Golput dianggap sebagai tindakan yang menentang Imamah, maka Golput menurut MUI adalah haram.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Memilih (Golput)

Penjelasan teoritis terhadap perilaku Golput/ Non-voting pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan perilaku pemiliha diatas. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelley (1975), Burnham (1987), Powell (1986)

¹⁹Majeli Ulam Indonesia, *Keputusan Ijma` Ulama* Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 (Jakarta: MUI), hlm. 33

dan Downs (1957), Moon menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu Pemilu.

Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan psikologi sementara itu, pendekatan kedua menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan tersebut didalam dirinya samasama memiliki kesulitan dan mengandung kontroversi masing-masing.²⁰

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak memilih, yaitu faktor social ekonomi, faktor sosiologis dan faktor kepercayaan politik.

1. Faktor Sosial Ekonomi

Menempatkan variabel status social ekonomi sebagai variabel penjelasan perilaku *non-voting* selalu mengandung makna ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan perilaku *non-voting* tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel tersebut juga dapat digunakan sebagai faktor untuk mengukur karakteristik pemilih *non-voting* itu sendiri. Setidaknya ada empat faktor yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingakat pendapatan, pekerjaan dan pengaruh keluarga. Lazimnya

_

²⁰ Efriza, *Political explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.535

variabel status social ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status social, ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidak hadiran pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan steven J. Rossenstone yaitu²¹:

- Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih mengahargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilihan dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.
- Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran

_

²¹ Efriza, *Political explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 543

maupun pemilihan. Dalam sebuah tuilisannya, Wolfinger dan rossestone menjelaskan sebagai berikut, disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan untuk menekanteman sebayaknya untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara. Yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar.

Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan "the best knows about turnout is that citizens of higher social and economics status participate more in politics..." (yang utama tentang kehadiran bahwa warga Negara yang status social dan ekonomi lebih berpartisipasi politik...)

Penjelasan diatas menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara tingkat status social ekonomi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih.

2. Faktor Psikologis

Penjelasan *non-voting* dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih.

Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan peroragan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya. Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah ke efektipan personal (personal effectiveness), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-

organisasi sosial, profesi atau rekan kerja di mana mereka bekerja, dan sebagainya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *non-voting*di sebakan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan aleinasi²².

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna, mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai

²²Efriza, *Political explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 538

-

pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada diluar kontrol para pemilih.

Sebab para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *power lessness* inilah yang disebut sebagai anomi. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomi. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif, seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya.

3. Faktor Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang

partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.²³

Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam Pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidak percayaan dengan pemilihan yang bias membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidak percayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan

²³ Efriza, *Political explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 515

lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya.²⁴

Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Pertanyaannya yang akan diajukan apakah akan berpartisipasi, Apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya? dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan , jawabannya hampir selalu berupa: "tidak ada" ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling rasional. Hal ini menjadi alasan sampai kepada kesimpulan bahwa individu yang rasional dan mementingkan kepentinggan peribadi tigak akan bertindak untuk mewujudkakan kepentingan umum dan kelompok.²⁵

E. Kerungian golongan putih (Golput)

Menurut Witny dalam website miliknya ia berpendapat bahwa akibat dari Golput dapat membuat budidaya yang tidak peduli dengan Pemilu sehingga membuat mereka menjadi egois. Hal ini dapat dikarenakan dari berbagai pihak, baik dipihak generasi muda dan generasi tua bahkan pihal pemerintah juga ambil bagian masalah ini. Dalam hal ini yang berperan pemerintah itu sendiri, karena calon-calon Pemilu hanya manis di mulut saja, namun pada hakekatnya saat mereka menduduki kursi pemerintahan, mereka justru berubah menjadi egois dan

²⁴ Muhammad, Asfar, *Presiden Golput*, (Jakarta: Jawa Pos Press, 2004), hlm. 35-51

_

²⁵ Efriza , *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung : Alfabeta ,2012), hlm. 516

haus akan kekuasaan. Inilah yang membuat para generasi muda menjadi raguragu dalam memilih dan pada ahirnya membuat mereka tidak peduli dengan pemilihan umum.

Ketiga faktor itu lama kelamaan makin terkikis dengan perubahan yang ada. Generasi atau golongan muda mulai mengkikis rasa nasionalisme itu sendiri, makin tidak pedulinya mereka terhadap Pemilu mengakibatkan munculnya budaya baru yang saya rasakan akan sehebat budaya para korupsi yang ada di Negara kita ini, yaitu tidak lain budaya golongan putih.²⁶

Menurut Rivai secara defakto memang diligitimasi sagat akan sangat rendah namun disisi lain tindakan tidak ikut memilih atau Golput telah melegalkan kursi haram para pemimpin yang tidak memiliki syarat memiliki minimal perolehan suara, bahkan ada sebahagiannya hanya kebagian jatah partai.²⁷

Bagi masyarakat menjadi golongan putih baik karena apapun itu alasannya akan mempunyai kerungian bagi masing-masing orang. Namun kerugian yang secara umum yaitu hilangnya hak mereka dalam menentukan kemajuan bangsanya, dan mereka juga tidak dapat memprotes keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah karena mereka sendiri tidak ikut dalam memilih.

Bagi pemerintah, banyaknya rakyat yang memilih menjadi Golput membuat kerungian baik dari segi keuangan dan segi kepercayaan. Dari segi keuangan dapat dilihat saat pemerintah menyiapkan lembaran untuk Pemilu yang di

http: blogspot.com. budaya golongan putih dalam pemilihan di akses tanggal 25 Mei 2018
 http: politik kompas.com Golput bukan pilihan bijak di akses tanggal 25 Mei 2018

lebihkan jumlanya, namun ahirnya masih banyak lembaran yang terbuang percuma padahal uang dari lembaran itu dapat dialokasin untuk hal yang lain. Semakin tinggi angka Golput dalam Pemilu semakin menjadi rakyan tidak percaya lagi kepada pemerintahan. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat buruk bagi pemerintahan dan kemajuan Indonesia.

F. Kajian Terdahulu

Fenomena Golput merupakan hal yangsangat menarik untuk dikaji, hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh:

- 1. Rimbun P Sirait penilitian Skiripsi di Universitas Sumatra Utara yang berjudul judul faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung tahun 2008 di Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun, yang meneliti tentang bagaimana faktor penyebab mempengarugi masyarakat untuk tidak menggunakan hak suaranya atau tidak memilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2008 di Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun Sumatra Utara.²⁸
- Dalam Skripsi Stephanus Mulyadi dengan judul "Persoalan Hak-hak Warga Negara Dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus

²⁸Rimbun P sirait penelitian skripsi di Universitas Sumatra Utara dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Tidak Memilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Secara Langsung Tahun 2008 Di Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun ,Universitas Sumatera Utara , 2008

- 3. Pemilu 1992". Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fauzan yang berjudul "Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijma' Ulama 2009 di Padang.²⁹
- 4. Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul "Kebebasan, Negara, Pembangunan" yang merupakan kumpulan tulisan 1965-2005, ia menyatakan pendapatnya bahwa Golput pada saat ini hukumnya "tidak wajib" hal ini dikarenakan Pemilu 2004 partai bebas berdiri dan tidak dihalangi oleh pemerintah, tidak seperti pada 1972 di mana partai-partai yang tidak disukai pemerintah saat itu dilarang berdiri (kembali). 30
 - Rimbun P Sirait dalam skripsinya faktor-faktor yang menpengaruri masyrakat tidak memilih dalam pemilihan Gubernur Sumatra Utara di Kecamatan Pamatang Sidamanik. Dalam skripsinya ini membahas faktor apa saja yang telah mempengaruhi masyarakat si Damanik tidak ikut memilih dalam Pemilihan Gubernur Sumatrsa Utara.
 - Arif Budiman dalam bukunya yang berjudul Kebebasan Negara
 Pembangunan ia menyatakan bahwa Golput pada saat ini tidak wajib
 hal ini dikarenakan Pemilu 2004 partai bebas berdiri dan tidak
 dihalangi.
 - Dalam skripsi ini penulis memberikan judul Fenomena Golongan
 Putih (Studi Perilaku Polotik Masyarakat Kota Padangsidimpuan Pada

³⁰Arif Budiman, *Kebebasan Negara Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005* (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006), hlm. 31

²⁹Ahmad Fauzan, "Fatwa Hukum Pengharaman Golput pada Ijma' Ulama di Padang Panjang" Skripsi, perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2009, hlm. 45

Pemilihan Presiden 2014). Mencari bagaimana fenomenanya di lapangan dan faktor apa saja yang ada di lapangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat tergantung dengan permasalahan dan sifat penelitian, sebelum penulis mengemukakan metode penelitian ini, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan metode tersebut.

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Receararch), maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data yang ada di lapangan. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan pada dasarnya bersifat deskriptif. Menurut Sutrisno Hadipenelitian yang bersifat deskriptif maksudnya adalah orang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan secara umum. Dalam hal ini penulis akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan

35

¹Sustrisno Hadi *MotodologiRecearch*, (Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1986), Jilid1, hlm. 3

dengan perilaku Fenomena Golput pada pemilihan Presiden RI tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Yaitu menjelaskan dimana lokasi tempat dilakukannya penelitian dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian ini dilakukan di mayarakat kota Padangsidimpuan, mulai bulan Oktober 2017ditargetkan selesai Maret 2018.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu data sekunder.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasiakan untuk umum oleh intansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder juga di sebut juga data yang tersedia.² Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya-karya dan dekumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apa bila tidak ditinjau dengan kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

²*Ibib*, hlm 81

D. Metode Pengumpulan Data

Mendapatkan data-data sebagai alat analisis data, diperlukan metode pengumpulan data, adapun metode yang digunakan adalah:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluru indera. Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Disamping itu juaga dapat menyaring data yang tidak objektif dari data yang di kemukakan oleh dari responden melalui interview. Mengingat pemilihan Presiden 2014 data yang didapat melalui wawancara kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas orang menyampaikan keterangan tersebut. Dengan demikian data yang di peroleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Metode Wawancara (Interviw)

Interviw atau juga yang di sebut dengan wawancara atau kiusioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakuakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpinpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti penentuan jumlah wawancara yang di tentukan berdasarkan sifat-sifat atau cirri-ciri yang mempengaruhi terhadap objek yang diteliti. Tekni ini memberikan jawaban

³Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial* (Bandung:Mandra Maju,1996), hlm.32

terhadap pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Pada perinsipnya sama dengan metode angket, pernyataannya di ajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara pertanyaan diajukan secara lisan.

Ada pun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpinpin yaitu kombinasi antara wawancara tidak terpinpin dan terpinpin, jadi pewancara hanya membuat pokok permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia ternyata menyimpang.⁴

Dengan wawancara ini peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang sesungguhnya tidak tanpak hanya dilakukan observasi semata, dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai yang ikut berperan dalam perilaku Golput pada pemilihan Presiden 2014 di Kota Padangsindimpuan yang mewakili KPU, tokoh agama, dan maysarakat.

Penentuan jumlah yang diwawancarai di tentukan berdasarkan sifat atau ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang akan diteliti.

3. Metode Dokumentasi

Sebagai objek yang diperhatikan dalam memperoleh informasi, kita mempersatukan tiga macam sumber yaitu tulisan (paper) tempat (place) dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan ini kita telah menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi

⁴Cholid Narbuko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,1997), hlm. 85

dari berasal kata dokumen yang artinya barang atau tulisan. Didalam melaksanakan metode dokumentasi menyelidiki benda tertulis seperti bukubuku, jurnal, dokumen, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemilihan Presiden.⁵

E. Teknik Analisa Data

Sesuai data terkumpul sesuai denagan kebutuhan yang di tentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengkelola data yang sudah terkumpul denagan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk di analisis. Data yang di peroleh dilapangan di ananalisa dengan menggunakan teknik analissi kualitatif. Teknik analisis kualitatif yaitu digunakan yaitu di gambarkan dengan kata-kataatau kaliamat, kemudian di pisah-pisahkan menurut katagori untuk diambil kesimpulan.⁶

_

⁵*Ibid*, hlm. 149

⁶Sutrisni hadi, *Op Cit*, hlm.3

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kota Padangsidimpuan

Sekitar tahun 1700-an kota Padangsidimpuan mulanya adalah dusun kecil yang berada dikampung Bukit yang disebut "padang na dimpu" oleh para pedangang. Kampung Bukit bermakna dataran yang tinggi yang di tumbuhi ilalang. Sehingga pada tahun 1825 Tuanku Lelo (Salah satu pemimpin pasukan Padri), membangun sebuah benteng dengan persetujuan Tuan Tambusai dengan didirikan benteng ini maka perdagangan berkembang ke Sitamiang.

Pada masa tahun 1830 pemerintah Belanda membentuk Distrik (setingkat kedewaan), yaitu Distrik Mandailing, distrik Angkola, distrik teluk Tapanuli dibawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* yang berkedudukan di Padang. Pada masa penduduk Jepang kota Padangsidimpuan tidak banyak berobah sehingga Indonesia merdeka, setelah proklamasi merdeka kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan bedasarkan Undang-undang darurat Nomor 7 tahun 1957.

1. Letak Geografis

Kota Padangsidimpuan terletak pada garis 1°8"00 s.d 1°28 '00" Lintang Utara dan 99° 13"00 s.d 99° 20' 00" Bujur Timur lokasi wilayah kota Padangsidimpuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanulin Selatan. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan

Batang Angkola dan Angkola Selatan), sebelah Barat berbatasan dengan (Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Angkola Selatan), dan sebelah timur berbatasan dengan (Kecamatan Angkola Timur.

Luas wilayah kota Padangsidimpuan adalah 14.456,66 ha, dengan luas daratan 146,85km persegi yang meliputi 6 kecamatan.

2. Domografis

Penduduk kota Padangsidimpuan tahun 2014 tercatat sebanyak 206.496 jiwa yang terdiri dari 100.642 laki-laki dan 105.854 perempuan sesuai data yang diperoleh dari DP4 Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalui Dinas Kependudukan.

Populasi penduduk Kota Padangsidimpuan mayoritas berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Pendidikan Tingkat Diploma dan Sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan studi ke pendidikan tinggi. Kepercayaan religius sebagian besar menganut Islam Muhammadiyah, NU, Katolik, dan Kristen Protestan serta Buddha suku terbesar dikota Padangsidimpuan adalah Batak Tapsel dan Batak Mandailing, ada juga Jawa, Minang. Mata pencaharian penduduk kota Padangsidimpuan sebagian besar Pedangang, Wirausaha, buruh, BUMN, Guru, PNS, Tni dan Polri.

3. Umur dan Jenis Kelamin

Klasifikasi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam table nomor satu.

Tabel 1: Penduduk menurut umur dan jenis kelamin dikota Padangsidimpuan.

Kelompok Umur	Jenis Umur		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	11.261	11.263	22.524
5-9	11.258	10.700	21.958
10-14	11.093	10.811	21.904
15-19	11.691	12.498	24189
20-24	9.808	11.238	21.046
25-29	7.858	7.977	15.835
30-34	7.122	6.945	14.354
35-39	6.464	6.881	13.409
40-44	6.182	6.164	13.063
45-49	5.892	5.305	12.056
50-54	5.021	3.870	10.326
55-59	3.608	3.591	8.478
60-64	2.161	2.732	3.031
65-69	1.299	1.299	1.732
70-74	824	824	1.176
75+	624	642	1.229
Jumlah	100.642	105.854	206.496

Sumber:BPS kota Padangsidimpuan

Menurut data statistik yang terakhir dikota Padangsidimpuan diketahui jumlah penduduk 206.496 jiwa yang. Jika dilihat dari factor jenis kelamin, maka penduduk kota Padangsidimpuan terdiri dari 100.642 jiwa laki-laki dan 105.854 jiwa perempuan. Dengan demikian komposisi penduduk kota Padangsidipuan hampir seimbang antara jumlah laki-laki dan jumlahperempuan.

4. Agama

Ditinjau dari agama yang dianut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Agama adalah beragama Islam. Dalam rangka meningkatkan kerukunan antar ummat beragama, dengan mudah dapat ditemukan berbagai jenis sarana ibadah. Adapun perinciannya dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Table 2: Kepercayaan Agama yang dianut dikota Padangsidimpuan.

No	Agama	Jumlah	Persen
1	Islam	176.743	85,57%
2	Kristen protestan	26.845	13,11%
3	Katolik	1.839	0,88%
4	Budha	909	0,43%
5	Konguchu	100	0,01%
	Jumlah	206.496	100%

Sumber: Kantor Wali kota Padangsidimpuan 2014

Empat Melihat mayoritas penduduk kota Padangsidimpuan merupakan pemeluk agama Islam, maka kerjasama antar masyarakat sangat mudah dilakukan. Sosialisasi sangat mudah dilakukan melalui tempat-tempat ibadah yang ada. Oleh karena itu, jumlah tempat ibadah sangat mendukung dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu factor yang paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai maka nantinya akan membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan karena kemajuan masyarakat sangat tergantung

pada mutu pendidikan yang diterima generasi muda. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel nomor berikut.

Table 3: Keadaan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat dikota Padangsidimpuan tahun 2014.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jumlah	Jumlah
	Sekolah	Guru/Dosen	Siswa/Mahasiswa
Sekolah Dasar	94	1.839	26.464
SLTP/sederajat	24	974	11.163
SLTA/sederajat	34	1.400	15.806
Akademi/Perguruan	7	4.896	56.679
Tinggi			
Jumlah	159	9.109	110.112

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan 2014

Melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta pemerintah khususnya pemerintah kota Padangsidimpuan dalam mendorong pembangunan bidang pendidikan.

6. Fasilitas Kota Padangsidimpuan

Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat secar bersama-sama merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Fasilitas rumah ibadah, fsilitas kesehatan, fasilitas olah raga dan fasilitas pendidikan harus dimiliki oleh sebuah Kota karena keempat hal tersebut merupakan bagian yang tidak bisa

dilepaskan dari kehidupan manusia. Fasilitas yang ada dikota Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas Rumah Ibadah

Rumah ibadah merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh semua umat manusia untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan dikota Padangsidimpuan sudah terdapat rumah ibadah yang mendukung setiap umat beragama untuk dapat melakukan ibadahnya dengan baik. Agar lebih jelas dapat dilihat dalam tabel nomor lima.

Tabel 4: Jumlah sarana Ibadah setiap dikota Padangsidimpuan 2014

No	Kecamatan	Mesjid	Gereja	Vhiara	Jumlah
1	Psp. Tenggara	55	14	-	69
2	Psp. Selatan	71	22	-	93
3	Psp. Batunadua	48	_	-	48
4	Psp. Utara	79	-	1	80
5	Psp. Hutaimbaru	45	3	-	47
6	Psp. Angkola Julu	26	4	-	30
	Jumlah	324	43	1	367

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Padangsidimpuan 2014

b. Fasilitas Kesehatan

Kota Padangsidimpuan dapat dikatakan telah peduli tentang kesehatan. Dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah telah terdapat rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah bersalin dan posyandu. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel nomor enam.

Tabel 5: Banyaknya fasilitas kesehatan menurut jenisnya dikota Padangsidimpuan.

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Uumu	3
2	Puskesmas	9
3	Puskesmas Pembantu	28
4	Rumah Bersalin Swasta	14
5	Klink Swasta	12
6	Pos Kesehatan Desa	22
7	Pos Pelayanan Terpadu	137
8	Prakter Dokter	35
9	Praktek Bidan	36
10	Apotek	28
11	Toko Obat	31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan 2014.

B. Gambaran Umum Keberadaan Golput di Kota Padangsidimpuan

Pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI tahun 2014 angka Golput mencapai 36% dari keseluruhan daftar pemilih tetap bisa dikatakan pasangan atau kandidat yang mengungguli adalah Golput.

Golput, adalah pelanggaran dari golongan putih, istilah ini diajukan kepada mereka yang dengan sengaja dan bermaksud denagn tujuan yang jelas memolak memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Dengan demikian, orangorang yang berhalangan hadir ditempat pemilihan suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari katagori Golput. Bengitu juga persyaratan yang diperlukan

untuk menjadi Golput bukan lagi sekedar memiliki rasa tidak peduli atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas.

Kota Padangsidimpuan yang menjadi sampel penelitian karena mempunyai tingakat Golput paling tinggi ditahun 2014 dari pada tahun 2009 pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI tahun 2014, lebih banyak dikatagorikan golput pragmatis, karena mereka apatis akan pemilihan yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil Pemilu.

Hal ini dikemukakan pada hasil wawancara salah satu pemilih di kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebagai berikut.

"Pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden, saya pribadi mengatakan Golput pada saat ini dikarenakan saya tidak terlalu percaya terhadap figur kedua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, selain itu suara saya yang tidak ikut memilih tidak akan terpengaruh terhadap hasil hitungan suara, maka dari itu saya lebih memilih tidak ikut memilih Presiden dan wakil Presiden dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting dari pada ikut memilih."

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat memilih Golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan bahwa suara mereka kelak

¹Hasil wawancara dengan informan masyarakat (*Tokoh Agama*). H. Ahmad Syaifuddin, Lc yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2018 Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

tidak ada pengaruh terhadap hasil pemilihan atau dapat dikatakan kepercayan politik yang mereka miliki dimasyarakat terjadi penurunan, atas alasan itu mereka lebih mementingakan pekerjaan pribadi dari pada dating ke TPS untuk membeikan hak suaranya. Pernyataan di atas menjelaskan tentang pemilih Golput dalam katagori pragmatis, sejalan apa yang di ungkapkan Idra J. Piliang bahwa Golput pragamtis yaitu Golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada Pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdamapak atas dirinya. Sikap mereka setengah-setengah hal ini didukung juga terhadap masyarakat yang tinggal dikecamatan Padangsidimpuan Tenggara banyak masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta, yang lebih mementingakan pekerjaan mereka ketimbang hadir ditempat pemungutan suara dihari pemilihan berjalan.

Sifat dari Golput pragmatis yang tidak permanen yang memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi atau tidak pada setiap Pemilihan yang diadakan. Berdasarkan hasil wawancara berikut ditemukan pemilih yang pada pemilihan Presiden lalu turut berpartisipasi dalam hal memilih namun pada pemilihan Presiden 2014 dia lebih memilih Golput.

"Pada pemilihan Presiden lalu saya memang memilih, ditahun ini saya tidak ikut karena saya melihat kedua pasangan calon ini tidak ada kerjanya yang membawa perubahan yang lebih baik baik dia calon no urut 1 dan no urut 2 sama saja, kemudian menurut saya pribadi memilih dan tidak memilih tidak memberikan pengaruh yang berarti".²

Tabe 6: Data Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

No.	Kecamatan			Jumlah
1.	Psp Utara	Lk	21.298	44.539
		Pr	23.241	
2.	Psp Selatan	Lk	23.262	48.614
		Pr	25.352	
3.	Psp Batunadua	Lk	7.419	14.956
		Pr	7.537	
4.	Psp Hutaimbaru	Lk	5.637	11.653
		Pr	5.026	
5.	Psp Tenggara	Lk	10.977	23.007
		Pr	12.030	
6.	Psp Angkola	Lk	2.859	5.807
		Pr	2.948	
	Total Dpt	Lk	71.452	148.586
		Pr	77.134	

Sumber: KPU kota Padangsidimpuan 2014

Tabel 6 : Data Penggunaan surat suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014

No	Kecamatan	Surat yang digunakan	Surat yang tidak digunakan
1.	Psp Utara	14.153	30.132
2	Psp Selatan	17.537	29.957
3	Psp Batunadua	5.146	9.872
4	Psp Hutaimbaru	3.656	8.197
5	Psp Tenggara	9.263	13.773
6	Psp Angkola	2.116	3.803
	Jumlah	51.959	95.734

Sumber: KPU kota Padangsidimpuan.

 $^{^2} Hasil$ wawancra dengan informan masyarakat Zamal Nasution ($\it Tokoh\ Masyarakat)$ yang dilakukan 4 April 2018 di Kecamatan Batunadua

Masyarakat Kota Padangsidimpuan tahun 2014 menggelar pesta demokrasi pemilihan Presiden dan wakil Presiden kamis 09 Juli 2014 beberapa tahun lalu. Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) kota Padangsidimpuan tingkat partisipasi pemilih di kota Padangsidimpuan mencapai 64% atau 95.734 orang yang menggunakan hak suaranya dari 148.586 orang daftar pemilih tetep artinya ada sebesar 36% Golput atau 51.959 orang yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014. Namun dari hasil rekapitulasi persentase pemilih menunjukan angka 64% dari jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 95.734 yang menggunakan hak suaranya. Sisanya sebanyak atau 51.959 36% memilih tidak menggunakan hak suaranya dengan kata lain angka Golput menaik dari tahun 2009.

Keberadaan Golput dikota Padangsidimpuan khususnya pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 sangat memperhatinkan. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang menentukan nasib suatu bangsa, masih dipandang kurang menarik perhatian masyarakat. Sebahagian masyarakat lebih memilih melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan atau menikmati masa libur lokal yang diberlakukan untuk pelaksanaan pemilihan ketimbang untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya.

Angka golput jauh cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Padahal masyarakat perkotaan memiliki akses politik yang lebih besar dari pada pedesaan. Fenomena ini dikarenakan masyarakat perkotaan lebih realistis dari pada masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan memandang pesta demokrasi ini hanya sekedar pertarungan antara beberapa kepentingan. Pemilih Golput beranggapan bahwa pertarungan ini bukanlah kepentingan untuk memajukan suatu bangsa, tetapi kepentingan oleh golongan tertentu. Jadi siapapun yang menjadi pemenang proses demokrasi ini, bukanlah menjadi kemenangan rakyat seutuhnya. Melainkan kemenangan golongan tertentu. Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat perkotaan yang sangat padat. Menjadi Alasan mengapa masyarakat tidak peduli terhadap momentum ini yang diadakan lima tahun sekali.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Yang Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih Tetapi Tidak Ikut Dalam Pemilihan

1. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor-faktor sosial ekonomi meliputi keadaan sosial dan keadaan ekonomi. Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi . Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan " the best known about turnout is that citizens of hinger social and economic status participate more in politics.." (yang utama tentang kehadiran bahwa warga negara yang status sosial dan ekonomi lebih berpartisipasi politik).

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal. Dari data yang didapat dapat dilihat bahwa secara umum Informan yang diambil adalah masyarakat dikota Padangsidimpuan yang sudah berpendidikan cukup tinggi.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa faktor pendidikan juga mempengaruhi masyarakat dikota Padangsidimpuan untuk ikut tidak dalam pemilihan. Sebab, masyarakat Padangsidimpuan yang tingkat pendidikannya cukup tinggi tidak ikut memilih (golput) dalam pemilihan bukan karena ketidak pedulian mereka terhadap pemilihan atau terhadap masalah politik tetapi, tingkat pendidikan yang cukup tinggi membuat mereka semakin kritis dan rasional terhadap masalah politik serta mempunyai penolakan yang cukup tinggi terhadap calon atau kandidat yang menurut mereka tidak mempunyai kapasitas yang baik untuk memimpin negara kelak, hal ini baru diketahui peneliti setelah menganalisis hasil wawancara terhadap beberapa informan dilapangan. sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang semakin kecil tingkat kepeduliannya terhadap masalah politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan dilapangan ditemukan Golput disebabkan oleh faktor social yaitu tingkat pendidikan pemilih, salah satu dari sekian informan yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang

Golput pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden 2014 hasil wawancara sebagai berikut:

"jujur saya katakan pada Pilpres yang lalu saya lebih memiilih Golput hal ini dikarenakan setelah saya analisa dari sekian Pilpres dikota Padangsidimpuan hanya menimbulkan rasa kecewa pada diri saya pribadi dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu mengumbar janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan, secara sosiologis menyerang keyakinan pada diri pemilih dan hal itu terus berulang sehingga menciptakan kekecewaan pada masyarakat dipesta demokrasi yang di adakan lima tahunan.³

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi juga menyebabkan seseorang Golput namun di Padangsidimpuan hal tersebut hanya ditemukan pada beberapa informan dan yang mayoritas Golput disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, kondisi masyarakat juga masih terdapat pemukiman yang masyarakatnya berstatus ekonomi rendah sehingga banyak ditemukan Golput yang terjadi pada masyarakat yang kurang berpendidikan contohnya seperti hasil wawancara dibawah ini.

sejujurnya, alasan saya tidak memilih yaitu saya merasa kalau pengaruh dari suara yang saya berikan andai kata saya memilih pergi tidak bakalan berpengaruh besar terhadap setiap hasil keputusan yang akan

³ Hasil wawancara dengan informan, Rahmat SE yang dilakukan pada tanggal 28Maret 2018 di Kecamatan Angkola Julu

terjadi. Jadi dari pada saya capek-capek pergi antri untuk mencoblos di TPS mending saya pergi narik beca, saya pikir dengan itu lebih memungkinkan untuk saya dapat penghasilan dibanding capek-capek pergi mencoblos baru tidak ada di dapat apa—apa lagian selama ini jarang saya lihat Presiden turun langsung ke lapangan.⁴

Dari data yang didapat diketahui bahwa seluruh masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan wakil Presiden RI 2014. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tahun Padangsidimpauan kurang berpartisipasi dalam Pilpres tahun 2014 yang lalu .Mayoritas masyarakat beralasan tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan dugaan yang terbangun pada diri masyarakat yaitu karena mementingkan kepentingan ekonomi serta mereka menganggap bahwa Pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan dugaan tersebut terbangun karena didukung oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, hal ini senada dengan pendapat ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Padangsidimpuan.

"Saat ini masyarakat cenderung tidak menggunakan hak suaranya disebabkan karena masyarakat masih banyak masyarakat tingkat pendidikan dan ekonomi rendah sehinga lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan

 4 Hasil wawancara dengan Informan, Safaruddin yang dilakukan pada tanggal 1 Apri 2018 di Kecamatan Padangsidimpuan Utara

-

mayoritas sudah pesimis akan hasil pemilu siapapun yang akan terpilih nanti,maka tidak akan membawa perubahan apapun yang siknifikan. ⁵

2. Faktor Psikologis

Kedekatan masyarakat dengan salah satu tim sukses Presiden dapat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat ikut memilih maupun tidak ikut memilih, pada pertermuan hasil wawancara di lapangan mayoritas masyarakat yang menjadi informasi tidak mempunyai hubungan dengan kedua calon Presiden. Hal ini berarti bahwa kedekatan masyarakat dengan tim sukses calon Presiden dan wakil Presiden benar-benar mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan.

Kampanye adalah usaha yang dilakukan oleh para pasangan untuk meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan program-programnya. Melalui kampanye, para kandidat menawarkan program-programnya dengan harapan masyarakat merasa yakin dan memberikan mandatnya. Bagi publik atau calon pemilih, kampanye merupakan sarana untuk melihat, mengamati, menentukan calon mana yang akan dipilihnya. Para calon kampanye melalui media massa, siaran televisi, radio, maupun melaluin spanduk.

Pada sebagian temuan dilapangan masyarakat terkadang kangum dan sebagian sudah mengetahui bahwa kampanye itu cuma janji diawal saja, seperti yang dikatakan oleh masyarakat di Untemanis:

-

⁵ Hasil wawancara dengan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Arbanur Rasyid, MA,yang dilakukan pada tanggal 14 April 2014 di kantor KPU Padangsidimpuan

"Disaat kampanye mereka memang berusaha melakukan pendekatan dengan masyarakat tentunya dengan maksud agar dipilih dalam pemilu , namun setelah terpilih kebanyakan mereka sudah tidak melakukan hal tersebut lagi"

Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kedekatan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup mempengaruhi masyarakat untuk menentukan tidak ikutnya dalam pemilihan.

Pada pemilihan Presiden tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan masyrakat juga cenderung memilih Golput dengan alasan faktor psikologis dimana ketidak kenalan yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat hal ini disebabkan lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat.

Bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh kelapisan bawah dan cenderung hanya berfokus disuatu tempat kemudian sikap apatis terhadap aktivitas politik seperti kampanye menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia. Hal tersebut ditemukan oleh salah satu tokoh agama di Pijorkoling:

"tegas saya mengatakan bahwa bukan faktor eksternal yang menjadikan saya Golput, namun saya pribadi menolak dan tak ingin ikut campur dalam aktivitas politik yang selama ini syarat akan kepentingan satu

-

 $^{^6\}mathrm{Hasil}$ wawancara dengan Informan Dedi yang dilakukan pada tanggal 4 April 2018 di Kecamatan Hutaimbaru

golongan selain itu saya tidak mengenal secara dekat semua kandidat hal dikarenakan jarang sekali ada kegiatan turun langsung bersosialisasi yang dilakukan terkhusus di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, jadi dapat saya simpulkan alasan saya Golput memang saya menghindari aktivitas politik yang merupakan kegiatan musiman dan tidak terlalu penting buat saya"⁷

3. Faktor Rasional

Berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara, dapat dilihat bahwa beberapa informan mengatakan bahwa visi dan misi yang diberikan setiap calon kedua Presiden memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk tidak ikut memilih pada saat pemilihan berlangsung. Sedangkan beberapa informan menyatakan bahwa visi dan misi yang diberikan setiap calon tidak mempengaruhi dalam hal tidak ikut memilih.

"Justru visi dan misi sudah sangat bagus untuk mendorong masyarakat memilih, namun kekecewaan dan pengalaman akan janji-janji yang tidak terwujud menjadikan saya enggan memilih".

Faktor rasional ini melihat visi dan misi yang diberikan partai politik harus jelas dan program yang dikemukakan harus menarik simpati para pemilih agar pemilih mau memilih mereka. Namun apabila para calon tersebut

 $^{^7 \}rm{Hasil}$ Wawancara dengan Makmur Nst (*Tokoh Agama*) Pada Tanggal 2 April 2018 di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

⁸Hasil Wawancara dengan Informan Masyarakat Pada Tanggal 7 April 2018 di Kecamtan Angkola Julu.

gagal dalam mempromosikan visi dan misi maupun program-programnya kepada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih (Golput) rasional bagi pemilih.

Data hasil temuan dilapangan diketahui beberapa mengatakan bahwa tidak mempercayai dan tidak peduli untuk mengikuti Pemilu. Sedangkan beberapa juga mengatakan bahwa mereka mempercayai dan merasa sangat perlu untuk mengikuti pemilu. Alasan mereka beraneka ragam, seperti salah satu masyarakat Sirappak:

"Pemilu memang perlu dan penting untuk pemilihan pemimpin namun saat ini berdasarkan fakta,calon yang telah terpilih tidak menepati janjijanjinya setelah mereka terpilih".

Dari data yang didapat diketahui bahwa sebagian masyarakat tidak ikut memilih karena alasan masyarakat tidak percaya dengan partai politik yang mengusungnya. Sedangkan sebagian lagi tidak ikut memilih karena mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka dari pada datang ke tempat pemilihan untuk memilih, mereka tidak percaya lagi dengan calon atau kandidat. Berikut hasil wawancara dengan salah satu mesyarakat yang Golput pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden di kota Padangsidimpuan:

⁹Hasil wawancara dengan Hanapi Ritonga pada tanggal 5 April 2018 di Kecamtan Hutaimbaru

"Saya tidak melihat sosok atau figur dari kandidat yang mampu memimpin Indonesia ini dengan baik,orientasi akan kekuasaan sangat terlihat pada peta kekuatan politik mereka , yang mana Ir. H. Jokowi Dodo yang di usung parta PDIP yang mana dulu mengawati pernah jadi Presiden RI dan pernanah menjual Indosat, kemudian gerindra muncul sebagai alat memprediksi elektabilitasnya pada pemilu 2014 sehingga dengan demikian saya memilih golput" 10.

Masyarakat dikota Padangsidimpuan sudah lelah dengan janji-janji kampanye yang diberikan oleh calon ataupun partai politik yang mengusungnya, tetapi janji-janji yang diberikan mereka tidak pernah ditepati. Para calon maupun partai politik yang mengusungnya cenderung mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya dari pada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak percaya dengan partai politik atau calon atau kandidat, sehingga masyarakat lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka daripada menghadiri acara pemilihan umum.

¹⁰Hasil wawancara dengan Informan Masyrakat, Samiun Siregar SH Pada tanggal 15 April 2018 di Kecamtan Angkola Julu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat Kota Padangsidimpuan, mengenai perilaku politik masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kesimpulan disini merupakan hasil data sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya

1. Berdasarkan dari uraian bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan golongan putih (golput) di masyarakat Padangsidimpuan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat memperhatinkan. Di lokasi penelitian ditemukan dua katagori Golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak ikut memilih atau tidak datang ke TPS yang *pertama* Golput Pragmatis, karena mereka apatis akan system Pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang terbagun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilihan, sedangkan yang ke *dua* sebagai masyarakat Golput politis, masyarakat yang tidak ada pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimitis bahwa pemilihan umum akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun calon atau kandidat yang sesuai dengan harapannya dank arena itu mereka tidak ikut memilih atau tidak datang ke TPS dan mereka di anggap Golput.

2. Pandangan islam tentang Golput

Adalah Haram untuk golput karna memilih Pemimpin MUI menganjurkan untuk memilih pemimpim yang mengemban tugas *Amar maqruf nahi mungkar* karnah. Oleh karena itu golput untuk memilih pemimpin harus di lawan dengan tangan, lisan, dan hati.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya golongan putih (Golut)

a. Faktor Sosial Ekonomi

Melihat tingkat sosial ekonomi di Padangsidimpuan dapat dikatakan turut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat dikota ini. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sebab pendidikan sebagai suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menganalisa teori serta mampu untuk menentukan keputusan dalam persoalan-persoalan untuk mencapai tujuan menjadi faktor yang penting bagi masyarakat sebagai pelaku partisipasi aktif dalam pemilihan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi juga menyebabkan seseorang Golput namun di Padangsidimpuan hal tersebut hanya ditemukan pada beberapa dan yang mayoritas Golput adalah disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, dan ekonomi yang rendah, kondisi masyarakat di Padangsidimpuan juga masih terdapat pemukiman- pemukiman yang masyarakatnya berstatus ekonomi rendah

sehingga banyak ditemukan Golput yang terjadi pada masyarakat yang kurang berpendidikan.

Faktor social ekonomi merupakan faktor sehingga masyarakat mayoritas Golput, tingkat pendidikan dan ekonomi rendah maka masyarakat terpikir pada dirinya adalah lebih mementingkan apa yang nampak dan menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan dari pada menggantungkan harapan yang tidak pasti.

Dengan persepsi inilah yang menjadikan masyarakat lebih mementingkan urusan lain seperti bekerja, dari pada menghadiri acara pemilihan. Karena dengan melakukan pekerjaan mereka otomatis akan memberikan keuntungan secara material kepada mereka, daripada menghadiri acara pemilihan. Karena dengan melakukan pekerjaan mereka otomatis akan memberikan keuntungan secara material kepada mereka, daripada menghadiri acara pemungutan suara.

b. Faktor Psikologis

Pada pemilihan Presiden 2014 dikota Padangsidimpuan masyarakat juga cenderung memilih Golput dengan alasan faktor psikologis dimana kedekatan yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat hal ini disebabkan lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan partai yang mengusungnya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh ke lapisan bawah.

c. Faktor Rasional

Dari data yang didapat diketahui bahwa sebagian tidak ikut memilih karena mereka menganggap pergi memilih tidak memberikan manfaat dan keuntungan apa-apa dan juga masyarakat tidak percaya dengan partai politik atau kandidat. Sedangkan sebagian lagi tidak ikut memilih karena mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka dari pada datang ke tempat pemilihan untuk memilih, mereka tidak percaya lagi dengan calon atau kandidat.

B. Saran-saran

Perilaku pemilih masyarakat dalam kegiatan pemilihan yang berupa memberikan sikap tidak ikut serta dalam pemilihan (Golput) merupakan fenomena yang sering terjadi dalam pemilihan dibeberapa daerah di Indonesia saat ini khususnya di Padangsidimpuan. Untuk menghindari fenomena ini agar tidak terjadi lagi ke masa depan, oleh karena itu dalam proses menyelesaikan penelitian ini ada beberapa saran yang akan menjadi harapan penulis ke masa depan yaitu:

1. Faktor sosial ekonomi, psikologis, dan faktor rasional memang menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan sikap pada saat pemilihan umum. Di dalam faktor social ekonomi, pendidikan sangat berperan karena melalui pendidikan masyarakat dapat menganalisa setiap pilihan yang akan ditetapkan untuk itu, masyarakat hendaknya diberikan pendidikan politik khususnya tentang wakil-wakil mereka yang akan duduk

- sebagai pemimpin, sehingga mereka tidak salah pilih dan memahami untuk apa mereka memilih wakil mereka tersebut.
- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dan partai Politik juga sangat minim saat ini, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh semua wakil rakyat maupun partai Politik. Hendaknya semua calon-calon yang sudah terpilih yang sudah memperoleh kedudukan harus menunjukkan perilaku yang baik dan melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat menepati janji-janjinya kepada masyarakat serta pada saat berkampanye.Jangan memberikan janji-janji hanya pada saat masa kampanye saja. Akan tetapi semua wakil rakyat beserta partai politik yang mengusungnya harus benar-benar menjalankan semua program-program kerjanya dengan baik yang mereka berikan pada saat kampanye mereka berlangsung. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pelaksanaan Pemilu akan meningkat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aktif dan ikut dalam pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novel, Peradaban Komunikasi Politik, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Asfar, Muhammad, Presiden Golput, Jakarta: Jawa Pos Press, 2004.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Arif, *Kebebasan Negara Pembangunan*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006.
- Bungin, Burhan, Metode Penelitian kuantitatif, Jakarta: Prenada media, 2005
- Efriza, Political Explore, Bandung: Alfabeta, 2012
- Hadi, Sustrisno, Metodologi Recearch, (Yogjakarta, Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Ihza Mahendra, Yusri, *Dinamika tata Negara Indonesia*, (Jakartta: Gema Insani Press, 1996.
- Iqbal Hasan, M, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Katono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandra Maju, 1986.
- Marijan, Kajung, Sistim Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru Jakarta: Kencana, 2010.
- Nurbuko, Cholid, dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Putra, Fadillah, *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Ui- Press, 1993.
- Syani, Abdul, Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial, Jakarta: Fajar Agung 1987.
- Yusuf Chirul Puad, H.M. Atho Muzhar, dkk. Fatwa Majelis Ulama Indnesia dalam Fersfektip Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI 2012.
- Wahid Abdurrahnan ddk, Megapa Kami Memilih Golput, Jakarta: Sagon, 2009

UU No. 10 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau dalam peraturan Komisi Pemilihan Umun No. 11 tahun 2008

Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijma` Ulam Komisi Fatwa Se-indonesia III tahun 2009*. Jakarta. MUI 2009.

http://www.kamusbesar.com/ fenomena diakses pada tanggal 29 November 2017 pukul 09:30

http://www. artikata. com/ diakses pada tanggal 29 November 2017pukul 09:35

News. detik. com,di akses tanggal 16 september 2017 pukul 15:30

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Karimun Sani Harahap

NIM : 14 103 000 14

Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 12 Oktober 1994

Alamat :Lobu Layan, Kecamatan Angkola Barat,

Kabupaten Tapanuli Selatan

No : 082163143963

Nama Orang Tua

Ayah : Arman Syufri Harahap Ibu : Tiwarsida Ritonga

Alamat : Lobu Layan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten

Tapanuli Selatan

B. PENDIDIKAN

1. Min Sihadabuan Tamat Tahun 2007

2. Pondok Al-Ansor Tamat Tahun 2010

- 3. PondokPesantrenMa`had Musthafawiyah, Tamat Tahun 2013
- 4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Htn) Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2018.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- 1. Ketua HMJ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Periode 2014-2015.
- 2. Sekretaris Pusat Kajian Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Periode 2015-2016.
- 3. Wakil Ketua Senat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Periode 2015-2016.

Motto: Hidup Berhenti Saat Engkau Berhenti Bermimpi

Penulis

Karimun Sani Harahap NIM, 14 103 00014

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK IMFORMAN

Ketua Komisi Pemilihan Umum

- Apakah KPU sudah mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2014 ?
- 2. Apa saja langkah KPU yang dilakukan pelaksanaan pemilihan tersebut ?
- 3. Bagaimana pelaksanaan yang terjadi dalam pemilihan tersebut ?
- 4. Tingkat Golput tinggi mencapai 36%, Apakah Pilpres berjalan dengan demokratis?
- 5. Menurut KPU faktor apa saja yang menyebabkan pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya ?
- 6. Untuk kedepannya strategi apa yang digunkan KPU untuk menguragi Golput di Pemilihan Umum Khususnya di Pilpres yang akan datang?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK IMFORMAN

Masyrakat Kota Padangsidimpuan

- Apakah anda mengetahui pemilihan Presiden di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2014 ?
- Apakah pihak KPU sudah mensosialisasikan tentang pemilihan presiden tahun
 2014 ?
- 3. Apakah anda ikut dalam pemilihan Presiden tahun 2014?
- 4. Apakah alasan utama anda tidak ikut serta memilih dalam pemilihan Presiden ditahun 2014 itu ?
- 5. Apa saja faktor yang menghambat bagi anda paling berpengaruh untuk Golput pada pemilihan Presiden ?
- 6. Apakah anda yakin pilihan untuk Golput dapat membawa perubahan?
- 7. menurut anda tingkat Golput, Apakah Pemilu tersebut sudah berjalan dengan demokrasi ?

DOKUMENTASI









